

KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 08 Januari 2011

Subyek : Tata Ruang

Hal : 26

Tangsel Kota Tanpa Rencana

tangerang selatan, kompas - Kota Tangerang Selatan identik dengan perumahan. Lokasi lokasi perumahan ditemukan hampir di setiap percabangan ruas jalan yang ada. Keberadaan kompleks perumahan itu kontras dengan kampungkampung di sekitarnya yang tumbuh tanpa rencana.

Perumahan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ini memang menjadi sasaran konsumen karena faktor kedekatannya dengan Jakarta.

"Di sini dekat ke Jakarta. Mau pakai kereta api, stasiun dekat. Mau pakai sepeda motor cuma 16 kilometer. Cukuplah," kata Kristi (29), warga perumahan di kawasan Bintaro, Jumat (7/1).

Di Bintaro telah berdiri kompleks perumahan kluster besar yang sudah ada sejak 30 tahun silam. Mencoba mengikuti sukses Bintaro Jaya, pengembang pun berlomba mendirikan perumahan di kawasan yang sama. Di Serpong, pengembang besar berikutnya menyusul membangun perumahan.

Kini, mungkin sudah ada ratusan kompleks perumahan di Tangerang Selatan. Mulai dari besar, kluster medium, hingga kluster kecil yang hanya terdiri dari beberapa rumah saja.

Dikuasai pengembang

Humas Bumi Serpong Damai (BSD) Anto Halusati mengatakan, awalnya, tahun 1988, kawasan BSD hanyalah hamparan hutan karet tidak produktif. Jalannya pun hanya jalan tanah. Kawasan ini direncanakan sebesar 6.000 hektar dengan tahap awal pembangunan 1.300 hektar, tahap selanjutnya seluas 2.400 hektar, dan terakhir seluas 2.300 hektar. Selain kompleks perumahan, kawasan itu dilengkapi sejumlah pusat perbelanjaan yang tumbuh pesat seiring pembangunan kawasan perumahan.

Setelah BSD mulai berkembang, tahun 1994 muncul kawasan kota mandiri Alam Sutra yang memiliki luas 800 hektar. "Kondisi saat ini yang sudah terpakai sebanyak 70 persen. Masih ada sekitar 300 hektar yang akan dibangun lagi," kata Manajer Humas PT Alam Sutra Tbk Lisa Djohan.

Dalam catatan Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan tercatat, dari 14.000 hektar total luas Tangerang Selatan, sebanyak 70 persennya sudah dikuasai pengembang. Sisanya terdiri dari permukiman dan perkantoran yang dikuasai oleh pemerintah dan perorangan.

Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan Eutik Suarta pernah mengatakan, saat ini Kota Tangerang Selatan masih menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diharapkan selesai tahun depan. "Arahannya kota yang baru terbentuk setelah pisah dari induknya Kabupaten Tangerang ini menjadi kota dagang, jasa dan permukiman," katanya.

Dosen Kajian Perkotaan Pascasarjana Universitas Indonesia Hendricus Andy Simarmata mengatakan, menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota agar bisa membangun harmonisasi antara kawasan di luar kekuasaan pengembang dan pengelolaan kota-kota mandiri milik pengembang.

"Pemerintah kota harus bisa memutuskan program-program maupun kebijakan pembangunan yang bisa menyeimbangkan kembali kota dengan daya dukung lingkungannya. Kalau tidak, kota ini tidak akan nyaman bagi warganya," kata Hendricus.

(PIN/NEL)